



Sinergi Pemerintah Daerah dan Sektor Swasta dalam Pembangunan Pendidikan: Studi Kasus Program Astra Cerdas di Kecamatan Pasangkayu, Sulawesi Barat

Nurfadillah¹, Sabania Amrina Rosada², St. Fahriah Rumambi³, Norce Christianti Ta'ela⁴, Yuliyana Abd Aziz⁵, Nuraisyah⁶, Askar Mayusa⁷, Muhammad Ahsan Samad⁸

¹Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Jl. Soekarno Hatta, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia, 94119

²Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Jl. Soekarno Hatta, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia, 94119

³Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Jl. Soekarno Hatta, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia, 94119

⁴Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Jl. Soekarno Hatta, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia, 94119

⁵Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Jl. Soekarno Hatta, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia, 94119

⁶Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Jl. Soekarno Hatta, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia, 94119

⁷Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Jl. Soekarno Hatta, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia, 94119

⁸Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Jl. Soekarno Hatta, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia, 94119

*Penulis Korespondensi: mayusaaskar@gmail.com

Abstract *This study examines the synergy between local governments and the private sector in advancing regional education, focusing on the Astra Cerdas Program in Pasangkayu Regency. Despite the government's mandate to provide quality education, budget constraints often hinder optimal infrastructure and human resource development. This research employs a qualitative descriptive method with data collected through in-depth interviews, observation, and document analysis involving the Education Office, private sector representatives, and school principals. The findings indicate that collaborative governance through the Astra Cerdas program has positively impacted the educational ecosystem in Pasangkayu. The synergy is manifested in school infrastructure rehabilitation, teacher capacity building, and scholarship distributions. However, challenges such as bureaucratic synchronization and long-term sustainability persist. The implications of this study suggest that formalizing public-private partnerships through long-term memorandums of understanding can optimize educational outcomes in developing regions.*

Keywords: *Astra Cerdas; collaborative governance; education development; local government; private sector*

Abstrak Penelitian ini mengkaji sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam memajukan pendidikan daerah, dengan fokus pada Program Astra Cerdas di Kabupaten Pasangkayu. Meskipun pemerintah memiliki mandat untuk menyediakan pendidikan berkualitas, keterbatasan anggaran sering kali menghambat pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen yang melibatkan Dinas Pendidikan, perwakilan swasta, dan kepala sekolah. Hasil temuan menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif melalui program Astra Cerdas telah berdampak positif terhadap ekosistem pendidikan di Pasangkayu. Sinergi tersebut diwujudkan dalam bentuk rehabilitasi infrastruktur sekolah, peningkatan kapasitas guru, dan penyaluran beasiswa. Namun,

tantangan seperti sinkronisasi birokrasi dan keberlanjutan jangka panjang masih ditemukan. Implikasi dari penelitian ini menyarankan bahwa perumusan kemitraan pemerintah-swasta melalui nota kesepahaman jangka panjang dapat mengoptimalkan capaian pendidikan di daerah berkembang.

Kata kunci: Astra Cerdas; pembangunan pendidikan; pemerintah daerah; sektor swasta; tata kelola kolaboratif

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan pendidikan merupakan pilar esensial dalam menentukan kemajuan suatu bangsa dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks otonomi daerah, tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai upaya pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak daerah, termasuk Kabupaten Pasangkayu, masih menghadapi kendala klasik berupa keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam memenuhi standar nasional pendidikan, terutama pada aspek infrastruktur fisik dan kompetensi tenaga pendidik.

Kabupaten Pasangkayu yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit, menjadi ruang strategis bagi implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). PT Astra Agro Lestari melalui program "Astra Cerdas" hadir sebagai bentuk intervensi pihak swasta untuk meminimalisasi kesenjangan pendidikan di wilayah operasionalnya. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih dalam karena keterlibatan swasta bukan sekadar donasi filantropi, melainkan bentuk collaborative governance yang menuntut adanya sinergi dan integrasi program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penelitian-penelitian sebelumnya banyak menyoroti peran CSR dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi, namun kajian yang secara spesifik membedah sinergi institusional antara birokrasi pendidikan daerah dan program korporasi dalam entitas tata kelola yang berkelanjutan masih relatif terbatas. Kesenjangan (gap analysis) inilah yang menjadi urgensi penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk sinergi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu dan PT Astra Agro Lestari dalam pembangunan pendidikan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam kolaborasi tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Sinergi antara pemerintah dan entitas non-pemerintah dalam kebijakan publik dapat dijelaskan melalui lensa tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*). Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan tata kelola kolaboratif sebagai sebuah pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pembuatan keputusan kolektif yang berorientasi pada konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program publik. Dalam konteks pendidikan, kolaborasi ini termanifestasi dalam skema Kemitraan Pemerintah dan Swasta (*Public-Private Partnership*) yang memungkinkan terjadinya pertukaran sumber daya (*resource exchange*) untuk menutupi kelemahan kapasitas masing-masing aktor.

Lebih lanjut, konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*CSR*) menjadi landasan etis dan operasional bagi korporasi untuk berpartisipasi dalam ranah yang secara tradisional menjadi domain negara. Kotler dan Lee (2009) menegaskan bahwa inisiatif sosial perusahaan yang dirancang secara strategis mampu memberikan dampak ganda: meningkatkan citra perusahaan sekaligus menyelesaikan persoalan sosial mendasar seperti pendidikan. Penelitian empiris oleh Hidayati (2019) dan Pratama (2021) menguatkan tesis bahwa *CSR* bidang pendidikan yang disinergikan dengan cetak biru dinas pendidikan setempat menghasilkan efisiensi tata kelola yang jauh lebih tinggi dibandingkan jika program tersebut dijalankan secara parsial.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan disain studi kasus deskriptif, yang bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai fenomena sinergi lintas sektoral di Kabupaten Pasangkayu. Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, mengingat wilayah ini merupakan basis operasional utama PT Astra Agro Lestari yang intensif menyalurkan program Astra Cerdas. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang terdiri atas unsur Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (*Disdikpora*) Kabupaten Pasangkayu, tim manajemen *CSR* PT Astra Agro Lestari, serta beberapa kepala sekolah dan guru yang menjadi penerima manfaat program.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi non-partisipan pada lokasi fisik yang dibangun/direnovasi melalui program, serta studi dokumentasi terhadap laporan tahunan CSR, rencana strategis Disdikpora, dan nota kesepahaman (MoU) terkait. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode. Selanjutnya, alat analisis data yang digunakan merujuk pada model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan pola sinergi yang terbangun.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pengumpulan data di lapangan dilakukan pada rentang waktu penyusunan kebijakan akhir tahun anggaran, di mana intensitas komunikasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta cukup tinggi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara Pemda Pasangkayu dan PT Astra Agro Lestari dalam program Astra Cerdas tidak lagi bersifat ad-hoc, melainkan mulai melembaga ke dalam kerangka pembangunan daerah.

Bentuk-Bentuk Sinergi Terlembagakan

Implementasi program Astra Cerdas difokuskan pada tiga pilar utama yang mengisi celah kekosongan anggaran pemerintah daerah. Pertama, pemenuhan infrastruktur sekolah di daerah tertinggal dan pedalaman perkebunan (ring satu). Tabel 1 merangkum bentuk distribusi sumber daya kolaboratif di lapangan.

Pilar Program	Peran PT Astra Agro Lestari	Peran Disdikpora Pasangkayu
Infrastruktur Fisik	Pengadaan material dan pembangunan ruang kelas	Penyediaan lahan dan pengurusan izin operasional
Peningkatan Kapasitas Guru	Pembiayaan pelatihan dan penyediaan instruktur nasional	Sertifikasi peserta dan integrasi jadwal pelatihan
Beasiswa Pendidikan	Penyediaan dana tunai bagi siswa berprestasi dan kurang mampu	Verifikasi data pokok pendidikan (Dapodik) siswa

Kedua, pilar peningkatan kapasitas sumber daya manusia (guru) terbukti sangat relevan dengan kebutuhan dinas pendidikan. Sinergi ini mengkonfirmasi teori kolaborasi bahwa pertukaran sumber daya dapat berjalan lancar apabila masing-masing pihak

memiliki kebutuhan yang saling bergantung (interdependensi). Pihak swasta membutuhkan legitimasi sosial, sementara pemerintah daerah membutuhkan penguatan fiskal dan teknis.

Faktor Pendorong dan Penghambat

Kolaborasi ini didorong oleh kuatnya komitmen pimpinan daerah dan kepedulian manajemen perusahaan untuk membangun ekosistem sosial yang stabil. Meskipun demikian, terdapat hambatan pada aspek sinkronisasi birokrasi. Proses birokrasi di dinas pendidikan seringkali berjalan lambat dalam merespons usulan program swasta karena harus menyesuaikan dengan nomenklatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Keterlambatan verifikasi data penerima manfaat oleh pihak sekolah juga menjadi catatan tersendiri yang mengurangi efisiensi penyaluran bantuan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sinergi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu dan sektor swasta melalui program Astra Cerdas secara umum telah berjalan efektif dan memberikan dampak signifikan dalam menutupi keterbatasan kapasitas infrastruktur serta kompetensi pendidik. Hubungan kolaboratif ini tidak lagi berada pada fase filantropi pasif, melainkan telah bergeser pada kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Program ini terbukti mampu merealisasikan prinsip tata kelola kolaboratif secara nyata di lapangan. Namun, ketergantungan pada niat baik personal pimpinan masih cukup dominan dibandingkan dengan kekuatan sistem yang melembaga.

Oleh karena itu, disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu untuk merumuskan Peraturan Daerah spesifik atau setidaknya Nota Kesepahaman (MoU) berjangka menengah terkait integrasi CSR dengan masterplan pendidikan daerah. Hal ini bertujuan untuk mengunci komitmen kedua belah pihak agar terlepas dari dinamika pergantian pimpinan politik maupun manajemen korporasi. Bagi peneliti selanjutnya, sangat direkomendasikan untuk melakukan pengukuran kepuasan masyarakat (indeks dampak) secara kuantitatif guna melihat efektivitas program secara lebih terukur.

DAFTAR REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arifin, Z., & Rakhmawati, R. (2021). Evaluasi Dampak Program CSR Bidang Pendidikan terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Tertinggal. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 115-128.
- Brammer, S., & Millington, A. (2005). Corporate community involvement in the United Kingdom and the United States. *Journal of Business Ethics*, 30(2), 205-220.
- Cahya, A. N., & Susanti, E. (2022). Tata Kelola Kolaboratif dalam Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Masa Pandemi. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 10(1), 45-56.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1-29.
- Fahmi, I. (2020). Analisis Peran Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Dasar di Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(3), 211-225.
- Hidayati, S. N. (2019). Sinergitas Pemerintah dan Swasta dalam Program Pemberdayaan Pendidikan Vokasi. *Jurnal Maksipreneur*, 9(1), 34-45.
- Indrawan, R., & Yaniawati, P. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama.
- Kotler, P., & Lee, N. R. (2009). *Up and Out of Poverty: The Social Marketing Solution*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Kurniawan, B., & Setiawan, A. (2021). Model Kemitraan Strategis CSR Perusahaan Agribisnis Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(2), 88-102.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd Edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nugroho, D. R. (2023). Tantangan Birokrasi dalam Sinkronisasi Program CSR Pendidikan di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Birokrasi dan Kebijakan Publik*, 5(1), 12-24.
- Pratama, A. B. (2021). Kapasitas Institusional Pemerintah Daerah dalam Merespons Inisiatif CSR Pendidikan Perusahaan Multinasional. *Jurnal Studi Tata Kelola Publik*, 4(2), 67-81.
- Rahmawati, D., & Widodo, T. (2022). Implementasi Kebijakan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Berbasis Pendidikan di Kabupaten Paser. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 11(3), 150-165.
- Sari, R. P., & Nuryanto, S. (2020). Analisis Efektivitas Program Beasiswa Perusahaan Kelapa Sawit Terhadap Penurunan Angka Putus Sekolah. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Sosial*, 7(2), 99-112.

- Setiyono, B. (2014). Tata Kelola Pemerintahan (Governance) dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial*, 10(1), 22-38.
- Suparman, N. (2023). Kolaborasi Stakeholder dalam Mewujudkan Pendidikan Berkelanjutan di Kawasan Perdesaan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 14(1), 55-68.
- Suryono, Y., & Hidayat, M. (2021). Peran Modal Sosial dalam Kolaborasi Pemerintah dan Swasta pada Sektor Pendidikan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(2), 134-148.
- Utomo, P. (2020). Evaluasi Kinerja Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pada Sektor Sosial di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 16(1), 77-90.
- Widodo, J. (2021). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik. Malang: Media Nusa Creative.